

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Organisasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1. Gambaran Umum Organisasi

- Terbentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. What, When, Who, Why, How
- Struktur Organisasi
- Keadaan wilayah. Luas, penduduk, perekonomian, kesmas

2. Pengadaan PNS

- Jumlah PNS. Dulu&sekarang
- Keadaan pemekaran di P. Seribu dibanding daerah pemekaran lain
- Kekurangan PNS atau cukup
- Respon Pemprov DKI
- Sistem dalam pengadaan PNS
- Pegawai yang dimutasi ke P. Seribu. Mengapa&bagaimana kinerjanya
- PNS yang enggan ditempatkan di P. Seribu. Mengapa&apa solusinya
- Proses Pengadaan PNS. Masalah&solusinya
- Upaya dalam Pengadaan PNS. Kualitas&kuantitas
- Inovasi untuk P. Seribu secara keseluruhan, untuk wisatawan, masyarakat, dan PNS
- Sarana transportasi dan akomodasi, listrik, dan air bersih

Untuk Pemprov DKI Jakarta

- Terbentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. What, Why, When, Who, How
- Jumlah PNS P. Seribu. Dulu&sekarang
- Jumlah PNS sudah cukup atau masih kurang
- Permintaan penambahan pegawai. Respon
- Proses Pengadaan PNS di P. Seribu
- Kualifikasi PNS&kuantitas
- PNS yang dimutasi dan/atau ditempatkan ke P. Seribu. Mengapa&bagaimana kinerjanya
- Upaya P. Seribu dalam pengadaan PNS. Kendala&Solusinya
- *Zero Growth*

Untuk PNS, CPNS, calon pelamar, dan masyarakat umum

- Gambaran tentang P. Seribu. Status&keadaannya
- (Jika (C)PNS/calon pelamar) Bersedia ditempatkan di P. Seribu. Mengapa
- Optimalisasi P. Seribu dalam pembangunan dan pemerintahan
- Upaya P. Seribu menarik minat masyarakat, PNS, wisatawan (sarana&prasarana)
-

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ir. Abdul Rachman Andit, M.Si Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jumat, 28 Maret 2008

- Retno (R): Selamat siang, pak. Saya Retno mahasiswi Adm. Negara FISIP UI tingkat akhir. Saat ini saya sedang menyusun skripsi dan kebetulan *site* penelitian untuk skripsi saya tuh di sini, pak. Nah, untuk sekarang saya mau sedikit wawancara dengan bapak untuk skripsi saya ini, pak.
- Rachman (Ra): Oh...begitu ya? Skripsinya tentang apa, mba? Dan kenapa di sini?
- R: Saya mau melihat bagaimana proses pengadaan PNS di sini, pak. Kemudian, kenapa saya memilih di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS) ini, karena saya ingin melihat dari sudut pandang daerah pemekaran baru dari DKI Jakarta.
- Ra: Iya benar. KAKS memang merupakan daerah pemekaran baru. Sebelumnya, KAKS ini masuk ke dalam salah satu kecamatan di Kotamadya Jakarta Utara. Namun, karena karakteristik wilayah KAKS ini sangat berbeda dengan wilayah di DKI Jakarta pada umumnya dan Jakarta Utara pada khususnya, maka untuk pengambilan keputusan level bawah sangat sulit dan memakan waktu yang lama. Apalagi untuk pelayanan publiknya sangat minim sekali. Bayangkan saja, masa kalau mau mengurus KTP saja harus menyeberang dari pulau ke pulau. Bahkan ongkos untuk naik ojek kapalnya saja sudah lebih mahal dari ongkos pembuatan KTP. Makanya untuk memudahkan itu semua, Kepulauan Seribu dimekarkan menjadi kabupaten baru di DKI Jakarta ini.
- R: Lalu, bagaimana dengan pegawai di sini sebagai orang yang melayani masyarakat KAKS?
- Ra: Nah...itu dia, mba yang jadi problem kita saat ini. KAKS terbentuk saat otonomi daerah mulai diterapkan. Dan sejak saat itu, Menpan mengeluarkan kebijakan *zero growth*. Bayangkan, saat pertama kali terbentuk KAKS ini, pegawai kabupatennya hanya 8 orang. Padahal kita punya 110 pulau, 11 pulau diantaranya berpenduduk sisanya sebagai pulau resort dan pulau yang hanya terdiri dari pasir dan batu karang, dan kita punya 2 kecamatan yang di dalamnya ada 6 kelurahan. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat kalau pegawainya hanya segitu.
- R: Lalu, bagaimana solusinya?
- Ra: Ya, kita berusaha untuk meminta tambahan pegawai kepada DKI Jakarta sebagai orang tua kita lah dalam tanda kutip. Mereka memang menambah pegawai kita. Catatannya, ini saat pertama kali terbentuk ya. Namun, tetap saja untuk pegawai kecamatan dan kelurahan sebagai *front liner* dalam melayani masyarakat kita masih kekurangan pegawai.

- R: Saya baca artikel di internet bahwa sudah 3 sampai 4 kali KAKS mengajukan tambahan pegawai lagi, namun belum ada respon positif dari DKI?
- Ra: Ya benar. Mereka memang belum merespon permintaan kita untuk menambah pegawai saat ini. Mungkin karena mereka juga belum di kasih dari Menpan untuk nambah pegawai.
- R: Lalu, apakah hal itu mengganggu pekerjaan di sini?
- Ra: Sebenarnya, jumlah masyarakat KAKS tergolong sedikit dibanding dengan 5 kotamadya lain di DKI ini, jadi kebutuhan akan pelayanan masyarakat juga lebih kecil kan. Tapi, yang jadi masalah adalah karakteristik wilayah KAKS yang berpulau-pulau ini membuat kebutuhan pelayanan yang kecil tadi menjadi meningkat akibat sulitnya menjangkau masyarakat tersebut yang tersebar di 11 pulau pemukiman itu. Apalagi jika ke Pulau Sebir yang merupakan pulau terjauh. Jika kita mau mengadakan kunjungan ke pulau tersebut untuk memantau masyarakatnya dan pelayanan publik di sana, di saat BBM melonjak seperti ini biaya untuk solar *boatnya* saja sudah memakan 25 juta untuk sekali pulang pergi. Tidak mungkin jika hal itu kita lakukan setiap hari. Apalagi bagi masyarakatnya. Mereka pasti kewalahan dengan biaya, yang walaupun tidak sebesar itu jika naik ojeg kapal. Makanya, kita membutuhkan banyak pegawai, terutama untuk ditempatkan di kecamatan dan kelurahan. Jadi, pegawai-pegawai tersebut kita bisa sebar ke semua pulau berpenduduk.
- R: Lalu, bagaimana upaya dari KAKS dalam pengadaan PNS ini?
- Ra: Sebenarnya, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa jika keputusan pusat menetapkan bahwa tidak ada penambahan pegawai. Jadi, sebenarnya kita harus memanfaatkan SDM, sumber daya dana, dan peralatan yang ada untuk tetap menjalankan tupoksi kita. Namun, banyak kecamatan, kelurahan, badan, bagian, bahkan sudin yang rela menyisihkan sedikit gaji-gaji mereka untuk membayar tenaga bantuan, yang biasanya kita sebut Tenaga Lepas Harian. Seperti untuk mengetik surat keluar, mengarsipkan surat, mengantar surat, ABK, dll.
- R: Oh...begitu ya, pak? Lalu bagaimana dengan proses pengadaan PNS di KAKS ini?
- Ra: Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita mengajukannya ke BKD DKI, kemudian mereka akan mengusulkan ke Menpan. Mungkin untuk detail prosesnya bagaimana, keadaan pegawai, dan pelayanan masyarakatnya, mba bisa tanya langsung ke Kabag Kepegawaian.
- R: Baiklah. Nanti saya akan tanyakan langsung kepada beliau. Terima kasih, pak atas waktunya. Selamat siang.
- Ra: Iya, mba. Sama-sama. Nanti kalau sudah selesai, hasil skripsinya mba berikan ke DKI ya agar mereka tahu kondisi sebenarnya di KAKS ini dan kalau bisa dikaitkan juga dengan potensi alam di KAKS ya, mba. Semoga sukses. Selamat siang juga.

**Wawancara dengan Mirwan Tarigan, SH, M.Si
Kepala Bagian Kepegawaian
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Jumat, 11 April 2008**

- Retno (R): Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS)?
- Mirwan (M): KAKS sebelumnya adalah salah satu kecamatan di wilayah Kotamadya Jakarta Utara, maka berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, statusnya ditingkatkan menjadi Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Ibukota Kabupaten di Pulau Pramuka
- R: Berapa luas wilayah KAKS dan terdapat berapa kecamatan/kelurahan?
- M: Wilayah KAKS terletak di Teluk Jakarta dan Laut Jawa yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan laut seluas 6.997,50 Km² (11 kali luas daratan Jakarta). Terdapat 2 kecamatan dan 6 kelurahan. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan 3 kelurahan, yaitu Kel. P. Untung Jawa, Kel. P. Pari, dan Kel. P. Tidung. Sedangkan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan 3 kelurahan, yaitu Kel. P. Panggang, Kel. P. Harapan, dan Kel. P. Kelapa.
- R: Berapa jumlah PNS saat pertama kali dibentuk KAKS?
- M: Jumlah PNS pertama kali KAKS terbentuk adalah 88 orang terdiri dari 8 orang pegawai sekretariat, 23 orang pegawai kecamatan, dan 57 orang pegawai kelurahan. Untuk pegawai badan, kantor, sudin, dan seksi dinas belum ada, karena belum terbentuk.
- R: Berapakah jumlah PNS KAKS saat ini secara keseluruhan?
- M: Jumlah PNS di KAKS saat ini adalah 632 orang terdiri dari 84 orang pegawai sekretariat, 23 orang pegawai kecamatan, 51 orang pegawai kelurahan, 474 orang badan, kantor, sudin, seksi dinas, dan guru.
- R: Bagaimana keadaannya jika di darat atau di daerah pemekaran lainnya? Bandingkan!
- M: Bandingkan! Propinsi DKI Jakarta memiliki 5 kotamadya da 1 KAKS, jika dibandingkan dengan 5 kotamadya yang ada di darat dengan KAKS, jumlah pegawai yang ada sangat jauh berbeda. KAKS masih banyak membutuhkan pegawai untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di KAKS.
- R: Apakah jumlah PNS tersebut masih kurang untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu?
- M: Sangat-sangat masih kurang. Contohnya, di kelurahan masih banyak kekurangan pegawai yang seharusnya dalam 1 kelurahan itu pegawainya maksimal 15 orang beserta staf. Ini hanya terisi setengahnya yang notabene kelurahan merupakan ujung tombak jalannya pemerintahan di KAKS. Selain itu, kitakan bentuknya pulau-pulau, jadi butuh banyak pegawai. Tapi, ya kita memberdayakan apa yang ada sajalah. Dari pada banyak pegawai tapi malah tidak bisa kerja. Bahkan di kepegawaian ini hanya ada 7 orang. 1 kabag, 3

kasubbag, dan 3 staf. Jadi, staf ini tuh staf kepegawaian, bukan staf saya atau staf kasubbag. Jadi, semuanya kita kerjakan sendiri. Sampai-sampai untuk urusan mengetik surat, saya lakukan sendiri. Jadi, istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu.

R: Lalu, bagaimana solusinya?

M: Ya kita memberdayakan apa yang ada sajalah. Kalau memang ada yang mampu membayar orang untuk membantu tugas harian mereka, ya silahkan. Tetapi, itu tidak ada di anggaran. Jadi, benar-benar dari kantong mereka sendiri.

R: Apakah respon yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan penambahan jumlah PNS di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu?

M: Responnya sangat baik dengan memberikan kemudahan administrasi dalam proses pindah ke KAKS. Namun, kalau ada rekrutmen kita sistem jatah. Jatah, walaupun yang diminta sekian, tapi dalam kenyataannya hanya dikasih sekian, ya kita terima saja. Seharusnya dari BKD sebagai orang tua, bijaksanalalah mereka. Kalau kita kekurangan tenaga, ya seharusnya dikirimlah. Sebenarnya di sini bisa menjadi pembinaan loh, de. Tes mental, keadaan alamnya gimana. Terus, ruangan yang seadanya, seperti di sini. Kalau ade lihat tidak layak kan untuk dijadikan sebuah ruangan? Jadi, dengan ruangan segini kita harus tetap bisa bekerja. Ya kita berdayakan saja apa yang ada.

R: Apakah sistem yang dilakukan dalam pengadaan PNS di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu?

M: Sistem yang kita lakukan dalam pengadaan PNS di KAKS melalui prosedur yang berlaku, yaitu mengirim kebutuhan pegawai kepada BKD Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya BKD Propinsi DKI Jakarta memprosesnya karena kewenangan pengadaan PNS ada di tingkat Propinsi.

R: Apakah ada PNS yang dimutasi ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu? Apa alasan mutasi tersebut?

M: Jelas ada, dengan berbagai alasan. Salah satunya pengembangan wawasan terhadap kinerja yang bersangkutan.

R: Apakah PNS yang dimutasi tersebut bersedia ditempatkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan apakah PNS tersebut bekerja secara optimal?

M: PNS yang dimutasi ke KAKS bersedia ditempatkan di KAKS. Sejauh ini sangat optimal.

R: Apakah ada PNS atau CPNS yang tidak mau ditempatkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu?

M: Sangat banyak sekali PNS atau CPNS yang tidak mau ditempatkan di KAKS.

R: Apa alasan mereka tidak mau ditempatkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu?

M: Salah satu alasan mereka tidak ingin ditempatkan di KAKS, karena masih ada anggapan apabila ditempatkan di KAKS merupakan orang buangan dan banyak lagi alasan lainnya. Belum lagi masalah faktor alam, cuaca, masyarakat laut yang terkenal keras, dll. Seharusnya kan yang namanya pegawai negeri harus mau ditempatkan di manapun. Tapi, sebenarnya kembali kepada diri mereka masing-masing, de.

- R: Bagaimanakah proses pengadaan PNS di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu?
- M: Karena kewenangan pengadaan PNS ada di tingkat propinsi, oleh sebab itu kita hanya melakukan proses sesuai prosedur yang berlaku, yaitu mengirim kebutuhan pegawai kepada BKD Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya mereka akan memprosesnya.
- R: Apa masalah yang muncul terkait dengan pengadaan PNS di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?
- M: Masalahnya yaitu susah untuk dapat menarik pegawai ke KAKS, karena masih banyaknya anggapan apabila ditempatkan di KAKS merupakan orang buangan. Belum lagi masalah faktor alam, dll. Cara penyelesaian pernah kita coba untuk menarik pegawai yang asli orang pulau yang bekerja di darat, yaitu di 5 kotamadya dan propinsi untuk dapat mengabdikan kepada pulau tempat mereka dilahirkan dengan iming-iming jabatan apabila sesuai dengan peraturan. Masih tetap mereka tidak mau. Oleh sebab itu, kita sampai saat ini cara penyelesaiannya, yaitu mengirim kebutuhan pegawai kepada BKD Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya mereka akan memprosesnya.
- R: Apa upaya yang dilakukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam pengadaan PNS?
- M: Upaya yang kita lakukan, yaitu menerangkan kepada khalayak pegawai di darat bahwa kita kerja di KAKS bukan buangan, tetapi kekhususan dengan adanya tunjangan khusus bagi pegawai yang bekerja di KAKS sebesar 1x gaji, tunjangan cuti percaturwulan, dan mempermudah proses administrasi dalam perpindahan.
- R: Apakah inovasi yang dilakukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar PNS dan masyarakat umum juga para wisatawan mau bekerja, mengunjungi, dan merasa betah berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terkait masalah transportasi, akomodasi, listrik, dan sarana air bersih?
- M: Sebelum terbentuknya KAKS, belum adanya transportasi, akomodasi, listrik, dan sarana air bersih yang memadai. Tetapi, setelah KAKS sudah terbentuk, sampai dengan sekarang sudah banyak perubahan yang sangat pesat. Untuk transportasi sudah ada Kapal Transjakarta, Kapal Krapu yang melayani rute ke seluruh pulau-pulau yang berpenduduk. Akomodasi sudah banyaknya resort-resort yang ada dan cukup memadai yang ada di lingkungan rumah-rumah penduduk. Listrik sudah masuk pulau, jadi tidak menggunakan diesel lagi dan bisa beroperasi 24 jam walaupun baru daerah selatan, belum sampai daerah utara. Air bersih sudah banyak di setiap pulau berpenduduk yang terpasang alat RO. Masih banyak lagi inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah KAKS agar PNS dan masyarakat umum juga para wisatawan mau bekerja, mengunjungi, dan merasa betah berada di KAKS. Sampai lapangan terbang pun mulai diaktifkan lagi untuk dapat mempermudah akses ke pulau.
- R: Khusus untuk PNS yang bekerja maupun yang akan ditempatkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, apakah ada rumah dinas atau transportasi dinas maupun antar jemput untuk memudahkan mereka mencapai tempat kerja?

M: Untuk pegawai yang bekerja maupun yang akan ditempatkan di KAKS, rumah dinas sudah disediakan. Contoh untuk Dinas Teknis ada di Pulau Karya dan fasilitasnya sudah lengkap, mulai dari listrik sampai air bersih dan infrastruktur lainnya. Untuk transportasi pemerintah KAKS menyediakan transportasi massal untuk pegawai menuju pulau yang berangkat melalui kantor penghubung/transit Bahtera Jaya pada hari Senin pukul 7 setelah apel pagi dan untuk pulang pada hari Jumat pukul 8 dari dermaga Pulau Pramuka depan Kantor KAKS.



Wawancara dengan Dra. Hj. Maria Ibtiyah, M.Si
Kasubbit Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai
Badan Kepegawai Daerah
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
Rabu, 16 April 2008

Retno (R): Bagaimana proses pengadaan pegawai di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS), apakah lapor atau bagaimana?

Maria (Ma): Jadi gini, khusus di Propinsi DKI Jakarta tidak ada daerah Tingkat II, walaupun ada KAKS itu hanya bagian dari DKI, bukan pemerintahan sendiri. Kalau di daerah lain kan ada Dati I, yaitu propinsi dan Dati II, yaitu kabupaten, mereka mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah sendiri. Kalau di DKI tidak ada Dati II. Walaupun KAKS itu kabupaten, tapi tidak mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan administrasi kepegawaian sendiri, yang berwenang menyelenggarakannya tetap pada propinsi. Misalnya KAKS kekurangan pegawai atau ingin mengadakan penambahan pegawai, KAKS harus mengusulkan formasi, yaitu susunan pangkat dan jabatan yang dibutuhkan suatu unit dalam suatu organisasi. Dalam formasi yang diusulkan harus mengikutkan syarat/kriteria bagi jabatan/pangkat yang dibutuhkan. Contohnya, KAKS mengusulkan formasi pada tahun ini untuk menambah pegawainya sebanyak 100 orang, dari 100 orang tersebut, misalnya dibutuhkan tenaga ini dan tenaga ini dengan standar/kriteria seperti ini. Diajukan oleh KAKS kepada BKD (BKD) untuk satu tahun berjalan, karena BKD merupakan badan yang menyelenggarakan administrasi kepegawaian disana. BKD ini bertugas menyusun kebijakan, perencanaan yang berkaitan dengan kepegawaian di daerah sedangkan di pusat namanya Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Setelah KAKS mengajukan, BKD akan membuat kebutuhan pegawai secara makro, artinya kebutuhan DKI, bukan hanya KAKS saja yang kemudian ditetapkan dengan SK Gubernur bahwa, tahun 2008 misalnya, DKI membutuhkan 5000 pegawai, termasuk kebutuhan KAKS yang 100 orang tersebut. Kebutuhan formasi tersebut, diusulkan ke Menpan dan penetapannya pun disana. Masalah kepegawaian masih diatur melalui kebijakan pusat, dalam hal ini Menpan. Jadi, kebijakan tetap berada di tangan Menpan. Walaupun DKI mengajukan 5000 orang, tetapi Menpan hanya menetapkan 3000, berarti yang boleh dilaksanakan hanya 3000 saja, karena semua itu telah direncanakan dan setiap ada penambahan pegawai baru, negara harus menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal ini tentang belanja pegawai. Maksudnya dalam penggajian pegawai tiap bulannya. Jadi, kebijakan tetap berada di pusat gitu.

- R: Saya membaca dari internet dan wawancara secara langsung, tahun ini tidak ada penambahan pegawai, padahal KAKS telah 2 sampai 4 kali mengajukan penambahan pegawai kepada BKD, tetapi tidak ada respon positif dari DKI, itu bagaimana bu?
- Ma: Memang untuk tahun ini tidak ada proses rekrutmen pegawai, dan memang sudah 10 tahun tidak melakukan rekrutmen. Itu semua karena Menpan mengeluarkan kebijakan *zero growth*, maksudnya tidak ada rekrutmen pegawai untuk daerah sampai tahun sekian. Hal tersebut karena melimpahnya pegawai KANWIL pada saat itu, karena sekarang sudah OTDA dan KANWIL sudah tidak ada, maka pegawai KANWIL dilimpahkan menjadi Pegawai Daerah. Pada tahun 2000, jumlah pegawai DKI dari 74000 menjadi 106000, karena melimpahnya KANWIL-KANWIL daerah seperti KANWIL kesehatan, pendidikan dsb. Hal ini menyebabkan beban anggaran menjadi luar biasa besar. Makanya, Menpan menetapkan kebijakan *zero growth*. Proses rekrutmen baru ada pada tahun 2005, setelah 8 tahun tidak ada rekrutmen, itu pun kebijakannya adalah pengangkatan pengadaan pegawai dari pegawai honorer. Jadi, KAKS tidak bisa bilang kalau belum dikirim pegawai karena tidak ada respon positif dari DKI. Intinya, alasan kenapa KAKS tidak mendapat tambahan pegawai saat itu, karena tidak ada kebijakan dari pusat dan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, istilahnya kita terbentur oleh pusat.
- R: Kemudian bu, rekrutmen pada tahun 2005, apakah ada pegawai honorer yang dikirim ke KAKS?
- Ma: Ada dong. STPDN setiap tahun kan ada yang lulus, dan kita kirim kesana dan juga ada dokter-dokter, guru-guru. Kenapa KAKS bilang tidak ada penambahan pegawai, karena di KAKS kan ada sudin-sudin, jadi misalnya ada tenaga kesehatan yang dikirim ke KAKS yang menangani langsung adalah sudin kesehatan, jadi mungkin tidak terdeteksi sebagai pegawai kabupaten. Intinya pegawai yang ditangani oleh sudin-sudin yang terkait, terdaftar sebagai pegawai sudin. Kelihatannya tidak pernah dapat tambahan pegawai, padahal banyak banget. Ketika berbicara sudin, maka induknya adalah dinas bukan wilayahnya. Jadi, sudin secara struktur organisasi bertanggung jawab kepada dinas. Mungkin secara administrasi bertanggung jawab kepada walikota/bupati.
- R: Pada tahun 2005, apakah diantara 5 kotamadya dan 1 kabupaten itu, KAKS mendapatkan pegawai lebih sedikit dari yang lainnya?
- Ma: Ya sesuai prioritas dan kompetensinya. Karena KAKS masih baru dan kebutuhannyapun terbatas, dibandingkan dengan yang lainnya, otomatis jumlah PNS yang ditempatkan kesannya pun sedikit. Jadi, kita pakai perbandingan. Walaupun ada jenis yang punya kualifikasi sendiri, seperti keamanan kaya banpol, yaitu linmas dan trantib. Jadi, kalau bicara tentang tenaga keamanan memang banyak berasal dari sana. Karena kalau menyangkut tenaga honorer, kita *given*. Artinya, tenaga honorer akan bertugas di wilayah di mana mereka direkrut dan diangkat.

- R: Bu, apakah karena kualifikasinya belum sesuai kemauan KAKS makanya belum ada penambahan pegawai di sana atau memang karena terbentur dari pusat?
- Ma: Kan yang namanya penambahan pegawai tidak melulu dari rekrutmen. Bisa dari peningkatan kompetensi. Misalnya di sana (KAKS) tidak punya akuntan, karena tidak ada penerimaan, maka pegawai yang punya kualifikasi tertentu dan belum berusia 40 tahun misalnya dikirim tugas belajar akuntansi dan setelah selesai baru ditempatkan di KAKS. Bisa juga melalui mutasi. Tiap tahun banyak pegawai daerah yang mengajukan diri mutasi ke DKI. Kalau memang lulus dan sesuai dengan kualifikasinya, bisa ditempatkan di KAKS. Karena berdasarkan pengalaman tidak setiap tahun ada rekrutmen dan masih ditentukan oleh pusat. Jadi, kita harus banyak cara untuk memenuhi kebutuhan pegawai.
- R: Apa ada pegawai yang dimutasi bersedia ditempatkan di KAKS?
- Ma: Di DKI, setiap proses mutasi ada ada surat pernyataan. Artinya, mutasi itu kebutuhan instansi dan kebijakan pemerintah, jadi harus bersedia ditempatkan di mana saja.
- R: Rumor yang ada tentang pegawai yang dimutasi ke KAKS adalah orang-orang yang gagal/buangan. Bagaimana tuh, bu?
- Ma: Mba Retno sudah pernah ke KAKS?
- R: Sudah bu.
- Ma: Lalu, bagaimana menurut Mba Retno?
- R: Menurut saya, dari beberapa pegawai KAKS yang saya temui, termasuk Bapak Wakil Bupati itu orangnya kompeten semua, bu. Maksudnya sudah sesuai dengan bidangnya. Seperti Kepala Sudin Dipenda yang saya temui.
- Ma: Nah, memang seperti itu. Jadi, salah jika ada rumor yang bilang kalau pegawai yang dikirim ke KAKS itu adalah orang-orang buangan. Malahan banyak yang sukses setelah ditempatkan di sana. Seperti misalnya ada staf BKD yang ditempatkan di sana malah menjadi Kasubbab dari Kepegawaian di sana. Walaupun ada, hanya sebagian kecil dan itu tergantung orangnya, karena dia memang tidak memiliki keinginan untuk ditempatkan di sana. Artinya begini, setiap orangkan punya motivasi sendiri, ketika dia melihat penugasan dia di sana sebagai suatu yang tidak menyenangkan, *mindset*nya pasti negatif juga. Jadi, saat dia ditugaskan di sana dia berpikir bahwa, oh di sana tidak enak, tidak bisa berkembang, daerahnya minus. Maka pikiran-pikiran tersebut muncul karena *mindset* yang sudah dia bentuk sebelumnya dan dia beranggapan bahwa dirinya dibuang. Jadi, semua itu tergantung dari orangnya sendiri dan *mindset* yang mereka bentuk itu. Karena kalau dibuang, sebenarnya ada tunjangan khusus bagi orang-orang yang ditempatkan di sana.
- R: Itu di luar dari gajinya atau bagaimana?
- Ma: Iya, di luar dari gajinya. Cuma saya tidak begitu tahu berapa besarnya. Mba Retno bisa bertanya langsung ke sana. Hal ini untuk menunjang bahwa transportasi di sana terbatas, pulang tidak setiap hari, hanya hari-hari tertentu saja. Hal berat seperti inilah yang menjadi acuan mengapa ada tunjangan khusus di sana.

- R: Kalau di darat kan ada bus antar jemput pegawai, bagaimana dengan di KAKS?
- Ma: Kalau di sana ada *boat* antar jemput, mess pegawai, dan di darat juga ada kantor transit di pelabuhan dan kantor perwakilan atau kantor darat di Mitra Praja, Sunter.
- R: Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan PNS di KAKS apa saja?
- Ma: Sebenarnya, SDM di KAKS itu banyak ya, cuma karena memang daerahnya terpencil dan hubungan dengan darat agak sulit, jadi kualitas pendidikan penduduk di sana masih di bawah rata-rata. Lagipul mereka masih mengandalkan laut untuk hidup mereka. Jadi, sebenarnya kalau ada rekrutmen, kita umumkan ke mereka. Namun, kecenderungan yang ada malahan orang-orang dari luar pulau yang menjadi pegawai di sana. Kecuali untuk tenaga-tenaga keamanan, atau tenaga honorer lainnya cenderung berasal dari sana.
- R: Lalu, solusinya seperti apa, bu?
- Ma: Pasti upaya selalu ditingkatkan ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya di sana. Misalnya dalam hal pendidikan, penambahan sarana dan prasarana belajar, terus ada penyuluhan tentang pelayanan kesehatan. Jadi, ke depannya diharapkan akan terus membaik.
- R: Tadikan telah disinggung sedikit mengenai *zero growth*, bisa dijelaskan lebih jauh?
- Ma: Ya, jadi *zero growth* adalah penambahan nol. Maksudnya, tidak ada penambahan pegawai hingga tahun sekian. *Zero growth* itu mulai ditetapkan setelah ada otonomi daerah, sekitar tahun 2000. Jadi sejak saat itu tidak ada penambahan pegawai, baru ada tahun 2005 untuk tenaga honorer. Komposisinya, pengadaan saat itu 30% dari luar untuk jadi CPNS dan 70% untuk honorer dan kita akan menyelesaikan tenaga honorer ini sampai tahun 2009. Meyelesaikan di sini artinya pengangkatan dari tenaga honorer menjadi CPNS.
- R: Menurut ibu upaya apa yang harus dilakukan oleh KAKS supaya PNS, CPNS, calon pelamar mau ditugaskan/ditempatkan di sana?
- Ma: Yang pasti sesuai kebutuhan ya. Jadi gini, sepanjang KAKS membutuhkan pegawai dan kita bisa memenuhinya, maka akan kita kirim. Kalau masalah upaya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setiap CPNS harus menandatangani surat pernyataan. Artinya mereka harus mau ditempatkan di mana saja. Selain itu, kan ada tunjangan khusus, jadi orang termotivasi untuk mau ditempatkan di sana.

Wawancara dengan Drs. Herman E. Dani, MM
Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
(sebagai PNS di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
Jumat, 11 April 2008

Retno (R): Saya Retno dari FISIP UI sedang menyusun skripsi. Tema saya pengadaan PNS dan penelitiannya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS). Bisa wawancara sedikit, pak?

Herman (H): Boleh-boleh.

R: Baik, pak. Saya hanya ingin bertanya sedikit saja kok. Langsung saja pada pertanyaan inti, pak. Sebenarnya di Bagian Keuangan ini kekurangan pegawai atau tidak?

H: Wah...kalau bertanya kurang apa tidak, ya pasti kurang dong, de. Kita kan bagian yang mengurus masalah keuangan, bahkan gaji pegawai saja kita yang urus. Jadi, sensitif sekali dan butuh banyak pegawai dong.

R: Memangnya berapa pegawai yang ada sekarang, pak?

H: Sekarang ini pegawainya hanya ada 10 orang, termasuk 1 kabag, 4 kasubbag, dan 5 staf. Itu saja yang staf baru dikirim setelah kita minta berkali-kali, akhirnya ada juga orang yang di mutasi ke sini.

R: Apakah dengan pegawai segitu cukup untuk melaksanakan tupoksi, pak?

H: Ya jelas tidak dong. Makanya kita memberanikan diri untuk untuk membayar 3 orang lagi untuk membantu kita dengan anggaran pribadi kita sendiri, de.

R: Lalu, bagaimana solusinya?

H: Solusinya ya kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu dan peralatan yang ada. Jadi, misalnya kalau di instansi lain jam pulang kerjanya itu jam 4 atau jam 5, kalau di kita tidak berlaku hal itu. Kita pulang kalau kerjaan sudah beres. Kalau belum, ya berarti belum pulang. Padahal kita tuh tudak ada gaji lembur loh, de. Tapi, mau bagaimana lagi? Supaya kerjaan kita beres, ya mau tidak mau kita menambah jam kerja kita sendiri.

R: Idealnya berapa pak untuk bisa melaksanakan tupoksi dari bagian ini?

H: Idealnya? Bandingkan! Jakarta Pusat Bagian Keuangannya punya pegawai 27 orang belum termasuk Kabag dan Kasubbag. Sedangkan kita cuma punya 10 orang sudah termasuk kepala-kepalanya dan kalau ditambah dengan pegawai harian, semuanya ada 13 orang tetap saja, hampir 1:3 antara kita dengan Jakpus. Seharusnya sih pegawai kita yang ideal ada 15 orang belum termasuk kepala-kepala itu tadi.

R: Terima kasih atas waktunya, pak.

H: Sama-sama. Semoga cepat selesai ya, de.

Wawancara dengan A
PLH Bagian X Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Jumat, 27 Juni 2008

Retno (R) : Maaf mba, mba PLH di sini kan?

PLH A (A) : Iya betul. Ada apa ya, mba?

R: Saya Retno Mahasiswi FISIP UI yang sedang menyusun skripsi, kebetulan saya mengambil tema penarikan PNS di KAKS. Boleh saya wawancara sebentar?

A: Hmm... gimana ya? Boleh aja sih, tapi tolong nama saya jangan dicantumkan ya, mba.

R: Oh ya, bisa mba.

A: Oke. Kalo gitu, apa yang mau ditanyakan?

R: Bagaimana awal mula pembentukan PLH di KAKS ini dan untuk apa tujuannya?

A: Awalnya karena KAKS ini kan daerah pemekaran baru ya, butuh banyak pegawai, tapi karena ada *zero growth*, jadi ga boleh ada penambahan pegawai. Makanya KAKS inisiatif mempekerjakan PLH. Tapi, sebenarnya kita tuh di sini ga boleh mba. Soalnya kan ga ada diperaturan tentang pengangkatan PLH. Tapi dari pada kerjaan di KAKS ga selesai, makanya banyak Kabag, Kasie, Kelurahan yang pada bayar orang untuk bantuin mereka.

R: Berapa jumlah semua PLH di KAKS?

A: Kita ga punya absen mba, jadi ga ada yang tau persis berapa jumlah PLH di di sini. Mungkin kalo pejabat-pejabatnya sih tau, tapi kami (PLH) ga tau. Bisa sih dikira-kira. Hitung aja, setiap bagian, sudin, kelurahan, maupun kecamatan minimal punya 2 PLH. Sedangkan jumlah unit di sini kira-kira ada 53 unit. Jadi, ya sekitar 110 PLH gitu lah. Makanya ga ada absen, kayanya sih biar PLH ini ga bisa dilacak sama DKI. Kalo ketahuan, bisa-bisa KAKS kena sanksi mba. Terus kita bisa dipecat

R: Bagaimana dengan sistem penggajiannya?

A: Kita digaji bukan dari APBD, tapi dari kantong para kepala/sudin dll yang mempekerjakan kita. Pokonya para pejabat di sini gajinya gede-gede deh. Buktinya bisa bayar kita-kita. Tapi, ga tau juga sih siapa tau hasil dari uang panas perorangan atau malah jamaah seluruh KAKS. Wah, saya makan uang haram dong. Hahaha...

R: Sudah berapa lama jadi PLH?

A: Saya kan PLH di Bagian X, udah 3 tahun kerja ga punya absen, digaji sama Kabag X, bukan dari APBD. Jadi, sampai sekarang saya ga bisa ikut tes CPNS dari tenaga honorer. Kan kita bukan tenaga honorer. Dilihat dari gaji kita yang bukan beban APBD. Kasian sih, tapi mau gimana lagi. Yang penting kerja.

R: Terima kasih ya, mba.

Wawancara dengan M
Praja IPDN yang ditempatkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Jumat, 27 Juni 2008

- Retno (R) : Maaf mas, boleh wawancara sebentar untuk kepentingan skripsi?
- Praja M (M) : Boleh, tapi nama saya disamarkan ya!
- R: Mas praja IPDN kan? Apakah semua praja harus mau ditugaskan dimana saja?
- M: Iya betul, saya praja IPDN. Awalnya kalo masuk IPDN emang di sumpah untuk mau ditempatkan di mana aja. Tapi, namanya juga orang punya keinginan masing-masing, jadi ga semua praja mau ditempatkan di mana saja. Apalagi di medan-medan berat kaya Pulau Seribu, Aceh bekas daerah konflik, Maluku yang masih bentrok terus antar warga.
- R: Sudah berapa lama mas ditugaskan di KAKS? Mas berasal dari mana?
- M: Saya ini dari Makassar mba, baru 1 tahun setengah ada di Pulau. Jadi, masih enak-enak saja kerja di sini. Sebenarnya kalo mau cari kepuasan batin dan karir cepat meningkat, ya di sini tempatnya. Soalnya saingannya dikit, udah gitu ada tantangan tersendiri bagi saya untuk bekerja di sini.
- R: Praja mana yang benar-benar mau ditugaskan di KAKS?
- M: Kebanyakan praja yang mau ditempatkan di sini tuh praja yang dari dulu emang tinggal di daerah laut atau yang emang punya keturunan pelaut. Pokoknya yang ada latar belakan kelautan deh. Jadi, mereka udah ga asing lagi dengan wilayah Pulau Seribu ini mba. Tapi, kaya saya bilang tadi, semua balik lagi ke pribadi orang masing-masing.
- R: Apakah ada sanksi jika praja tidak mau ditugaskan di suatu wilayah?
- M: Sebenarnya sih ga boleh, tapi kalo uang udah bicara, mau gimana lagi?
- R: Apa motivasi mas mau ditugaskan di KAKS?
- M: Kaya yang saya bilang tadi, mau memuaskan batin, karena kerja di sini penuh tantangan dan biar bisa cepat meningkatnya karir.
- R: Oh begitu. Ya sudah, terima kasih waktunya, mas.
- M: Sama-sama

Wawancara dengan J

Praja IPDN yang ditempatkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, namun dimutasi ke Jakarta Z berdasarkan permintaan sendiri

Jumat, 27 Juni 2008

Retno (R) : Maaf mengganggu, bisa wawancara sebentar?

Praja J (J) : Untuk apa? Dari mana?

R: Saya Retno, mahasiswi FISIP UI, saya sedang menyusun skripsi tentang Penarikan PNS dan saya mengambil lokasi di KAKS.

J: Boleh aja, tapi tolong nama saya ga disebutkan ya! Dan saya Cuma punya waktu sedikit banget. Udah mau solat jumat.

R: Baik. Saya mau tanya, apakah mas praja IPDN yang ditugaskan di KAKS? Sudah berapa lama mengabdikan di sini?

J: Betul. Saya sudah 2 tahunan di sini.

R: Kenapa mas mau ditugaskan di sini?

J: Awalnya saya mau ditugaskan di sini karena memang udah kewajiban saya. Semua praja harus mau ditempatkan di mana saja.

R: Apakah mas menikmati penugasan di sini?

J: Saya ga betah de di sini. Pulang seminggu sekali, mending lewat jalan darat, lewat laut. Memang sih boatnya enak. Tapi, kalau ombak lagi gede, ya pasrah saja. Kalau naik boat, saya muntah mulu. Makanya saya minta dimutasi ke Jakarta Z.

R: Alasan apa yang mas berikan agar bisa dimutasi?

J: Ya saya pake alasan macem-macem. Biar boleh dimutasi. Kalau pake alasan ga betah, ga bakalan dapat izin.

R: Apakah mas mau jika harus dimutasi ke wilayah semacam KAKS?

J: Waduh, jangan dong. Ini aja saya udah susah-susah minta mutasi ke Jakarta Z, masa saya harus mutasi lagi ke tempat yang mirip KAKS? Enggak ah. Saya ga nyaman dengan laut. Bawaannya pusing.

R: Berapa lama butuh waktu untuk proses mutasi?

J: Uh...lama banget. Ada kali 3 bulanan. Susah kalo praja minta mutasi. Makanya saya langsung syukuran pas udah dimutasi. Ade kebagian makanannya juga kan?

R: Iya dapat. Ya sudah, terima kasih telah meluangkan waktu mas dan terima kasih untuk makanannya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Retno Putri Lestari
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juli 1986
Alamat : Jl. Pepaya Raya No. 39 Rt. 003 Rw. 016 Jakarta
Utara 14130
Nomor Telepon : (021) 93636561 / 085691975507
E-mail : retnoputrilestari@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Paimin Pudji Saksono
Ibu : Suryati PS
Riwayat pendidikan formal :
SD : SDN Semper Barat 07 Pagi
SMP : SLTPN 30 Jakarta
SMA : SMUN 13 Jakarta